

ABSTRAKS

Dela Nurjanah: “Evaluasi Kebijakan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 berfokus pada pelaksanaan realisasi anggaran yang sedikitnya harus terealisasi sebanyak 95% agar terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis. Peraturan tersebut telah diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, tetapi pada evaluasinya, kebijakan tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasinya yang hanya menyentuh angka 66.14%, bahkan ada program yang belum terlaksana dengan baik, program yang belum terlaksana dengan baik tersebut menyebabkan realisasi belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung belum optimal. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung perlu memperhatikan evaluasi kebijakan belanja daerah agar belanja daerah dapat terserap dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, untuk mengetahui faktor yang mendorong keberhasilan evaluasi kebijakan belanja daerah, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar belanja daerah dapat tercapai sesuai target belanja daerah.

Penulis menggunakan teori William Dunn menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik dengan 6 Kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, reponsivitas dan ketepatan. Disandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Keuangan Negara atau Lembaga.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara pada beberapa staf keuangan dan program pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung serta observasi yang dilakukan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung memang telah diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, tetapi belum efektif karena belum memberikan dampak yang signifikan bagi realisasi belanja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, faktor yang mendorong keberhasilan evaluasi kebijakan belanja daerah antara lain faktor efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan pemerataan, upaya yang dilakukan Agar dapat mencapai target belanja yaitu dinas haruslah menentukan target capaian anggaran belanja daerah, selain itu penetapan anggaran di awal tahun atau di pertengahan tahun agar waktu yang digunakan untuk menggunakan anggaran pun menjadi lebih banyak dan anggaran pun dapat direalisasikan dengan optimal sesuai dengan keinginan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Belanja Daerah, Dinas Pekerjaan Umum.

ABSTRACTS

Dela Nurjanah: “Evaluation of Regional Expenditure Policy at the Public Works Office of Bandung City in 2017”

Regulation of the Minister of Finance number 258/PMK. 02/2015 focuses on the implementation of budget realization that should be realized at least 95% for the creation of effective regional finance management, efficient and economical. The regulation has been adopted by the Bandung Public Works Department, but in its evaluation, the policy has not been properly realized. It can be seen from its realization that only touched the 66.14%, there are even some programs that have not been carried out well. The Program that has not been carried out well led to the realization of regional expenditure on the public Works Office of Bandung is not optimal. Therefore, the public Works Department of Bandung needs to pay attention to regional expenditure policy evaluation so that regional shopping can be absorbed optimally.

Based on the background of the problem, the research aims to determine the implementation of regional expenditure policy on the Bandung Public Works office, to determine the factors that drive the success of regional expenditure policy evaluation, and to Efforts to make regional spending can be achieved according to regional spending targets.

Authors using the theory of William Dunn describe the criteria of public policy evaluation with 6 criteria, i.e. effectiveness, efficiency, adequacy, grading, reponsivity and accuracy. Pair with regulation of the Minister of Finance No. 258/PMK. 02/2015 on procedures of awarding and the imposition of sanctions on implementing budget of Ministry of Finance of State or institution.

Methods of research using qualitative methods of descriptive approach. The data collection techniques used are interviews on several financial staff and programmes at the Bandung Public Works Department as well as research observations. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation and withdrawal conclusion as well as verification.

Based on the results of research conducted by researchers, the implementation of regional expenditure on the public Works office of Bandung City has indeed been adopted by the Public Works Department of Bandung, but not yet effective because it has not had a significant impact for The realization of shopping at the Public Works Department of Bandung, a factor that encourages the success of regional expenditure policy evaluation, among other factors of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and alignment, the efforts to be Reach the target spending is that the agency must determine the target of the regional expenditure budget, in addition to setting the budget in the beginning of the year or mid-year so that the time used to use the budget becomes more and more budget can be realized optimally according to the wishes.

Keywords: Policy Evaluation, Regional Expenditures, Public Works Agency